

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

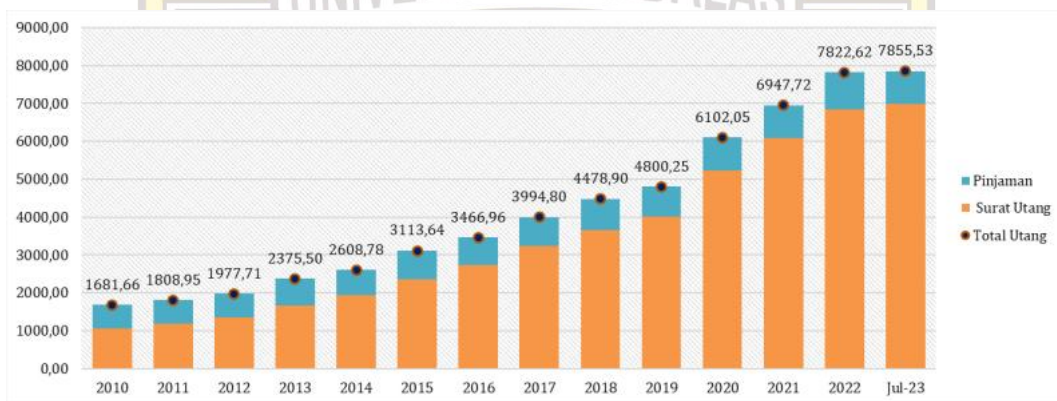
Faktanya utang tidak selalu berdampak positif terhadap perekonomian suatu negara. Dilansir dari Detik.com (2022) ada enam negara yang bangkrut karena utang, diantaranya Sri Lanka, Venezuela, Yunani, Ekuador, Argentina, dan Zimbabwe. Bahkan beberapa bukti juga menunjukkan bahwa beberapa negara yang menggunakan pinjaman untuk mendukung pembangunan mereka tidak mencapai kesuksesan yang diharapkan. contohnya utang luar negeri. Junaedi dan Arsyad (2018) mengatakan meski secara nasional utang luar negeri dapat meningkatkan PDB dan menurunkan kemiskinan, utang tidak mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Utang luar negeri bahkan cenderung menurunkan tingkat kesejahteraan.

Selain itu, banyaknya pemberitaan dan media masa yang membahas terkait utang, menimbulkan banyak pertanyaan dari masyarakat. Seperti yang dilansir dari CNBC Indonesia (2023) kalangan mahasiswa melontarkan pertanyaan kritis terhadap nilai utang pemerintah yang kian membengkak di atas Rp 7.800 triliun. Kemudian dalam majalah berita mingguan Indonesia TEMPO Alfarizi (2023) mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan “Kita diwariskan untuk membayar utang, setahun bayar utang dan bunga sampai seribu triliun. Ini terbesar dalam sejarah Indonesia sejak Merdeka”. Sedangkan dalam CNBC Indonesia Natalla (2023) menyampaikan tingkat utang dunia mencetak rekor tertinggi, begitupun dengan Indonesia. Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar

Negeri (ULN) Indonesia per Juli 2023 naik 0,07% dari US\$ 396,16 miliar menjadi US\$ 396,44 miliar atau sekitar Rp 6.105,2 triliun (kurs US\$1= Rp 15.400).

Selain banyaknya media masa yang memberitakan terkait utang negara, berdasarkan analisis APBN yang dilakukan oleh Mitra Komisi XI DPR dari tahun 2010 sampai pertengahan 2023 terjadi peningkatan utang secara terus menerus.

Gambar 1. 1 Posisi Utang Pemerintah (Rp Triliun)



Sumber : berkas.dpr.go.id

Dari gambar 1.1 dapat dilihat bahwa tidak ada tanda-tanda penurunan utang di setiap tahunnya. Selain itu, dari tahun 2019 ke tahun 2020 terjadi lonjakan utang yang sangat besar yaitu Rp1.302,8 Triliun dengan komposisi utang terbesar bersumber dari Surat Utang atau yang biasa disebut Surat Berharga Negara (SBN). Oleh karena itu, untuk melihat bagaimana transparansi pemerintah dalam mengelola utang, penelitian ini akan lebih fokus pada salah satu komponen utang, yaitu Surat Berharga Negara (SBN). Alasan peneliti lebih fokus mengkaji atau menganalisis SBN adalah karena SBN memiliki jumlah yang relative lebih besar dari komponen utang yang lain (material). Meskipun demikian peneliti akan tetap menganalisis semua komponen yang berkaitan dengan utang guna mendapatkan hasil dan analisis yang lebih mendalam.

Sejalan dengan itu, meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good government*), telah mendorong pemerintah pusat untuk menerapkan akuntabilitas *public* serta transparansi dalam penegelolaan laporan keuangan (Wilopo, 2017). Sehingga semua kegelisahan dan pertanyaan masyarakat bisa terjawab apabila pemerintah mampu dan mau transparan dalam pengelolaan keuangan ataupun pelaporan keuangan negara. Tranparansi sendiri merupakan adalah representasi dari tanggung jawab dan kualitas pelaporan keuangan yang menunjukkan sejauh mana informasi keuangan yang dipresentasikan oleh sebuah entitas sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. (Supratikta dan Ernawati, 2020).

Sejalan dengan itu, Pasal 3 ayat 1 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa Keuangan Negara harus dikelola secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Untuk memperjelas dan mempertegas pentingnya transparansi terkait informasi laporan keuangan pemerintah di terbitkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pada pasal 9 ayat 1 UU No. 14 Tahun 2008 dinyatakan bahwa badan publik diwajibkan untuk secara rutin mengumumkan informasi publik sesuai dengan kebijakan Keterbukaan Informasi Publik, yang meliputi detail tentang kegiatan dan kinerja badan publik serta laporan keuangan terkait. Dalam pasal 7 ayat 2 UU No.14 Tahun 2008 juga ditekankan untuk memberikan informasi publik yang tepat, akurat, dan tidak menyesatkan sebagai bagian dari kewajiban mereka. Dengan diterbitkannya UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menunjukkan

komitmen pemerintah dalam memperbaiki keterbukaan informasi mengenai badan publik kepada masyarakat luas.

Berkaitan dengan transparansi terhadap pengelolaan utang, tentunya ada pihak yang terlibat secara langsung serta bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan transparansi dari utang itu sendiri. Satya (2015) mengatakan pihak-pihak yang terlibat dalam manajemen atau pengelolaan utang pemerintah meliputi:

1. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
2. Pemerintah, khususnya Menteri Keuangan
3. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang

Muara atau tahapan akhir dari pengelolaan utang pemerintah adalah dilaporkan dan dimuat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), yang terdiri dari penerimaan pinjaman, pelunasan pinjaman, dan pelunasan terkait pokok dan bunga utang itu sendiri. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sendiri adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (Mulyono dkk., 2021).

Untuk memastikan bahwasanya laporan keuangan tersebut sudah transparan tentu ada pihak yang melaksanakan pemeriksaan dan memberikan jaminan atau *assurance* terhadap laporan keuangan tersebut. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 menjelaskan Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga jelas bahwa BPK lah sebagai pihak yang paling

bertanggung jawab terhadap transparansi pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Meskipun sudah ada lembaga resmi yang melakukan pemeriksaan terhadap LKPP yang dilaporkan pemerintah, peneliti merasa perlu mengkaji lebih dalam terkait bagaimana tingkat transparansi pengelolaan utang negara oleh pemerintah karena banyaknya pertanyaan dan pemberitaan yang membahas terkait utang. Oleh karena itu, penelitian ini akan melakukan analisis audit dalam rangka menilai transparansi pengelolaan utang pemerintah pada LKPP periode tahun 2019 sampai tahun 2022.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam materi ini adalah :

1. Bagaimana pemerintah melakukan pengelolaan utang negara yang dilaporkan di LKPP?
2. Bagaimana transparansi pemerintah dalam pengelolaan utang negara yang dilaporkan di LKPP?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui dan menganalisis pengelolaan pemerintah terkait utang negara yang dilaporkan di LKPP.
2. Mengetahui dan menganalisis transparansi pemerintah dalam pengelolaan utang negara yang dilaporkan di LKPP.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian seperti dinyatakan diatas, diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan manfaat kepada berbagai pihak, diantaranya:

1. Bagi DPR, Kementerian Keuangan, dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang

Penelitian ini dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan utang negara. Serta memberikan masukan dalam rangka mengidentifikasi potensi area perbaikan atau peningkatan dalam proses pelaporan dan pengelolaan utang.

2. Bagi BPK

Penelitian ini sebagai masukan bagi BPK terkait potensi masalah atau kekurangan dalam sistem yang ada. Serta diharapkan dapat memberikan saran dalam menyusun rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan proses dan transparansi.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat membangun pemahaman publik tentang bagaimana utang negara dikelola dan dilaporkan oleh pemerintah. Sehingga dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses pengelolaan keuangan publik.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini akan menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bagian ini terdiri dari landasan teori yang berguna bagi peneliti dalam menjelaskan temuan penelitian, dan telaah penelitian terdahulu yang bermanfaat untuk menambah pengetahuan peneliti dalam meneliti, serta kerangka berfikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian ini terdiri dari desain penelitian, data dan metode pengumpulan data, teknik pengumpulan data, serta teknik pengolahan dan analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Bagian ini terdiri dari analisis terkait rumusan masalah.

BAB V PENUTUP

Bagian ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran.

